



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/22 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang pensiun, untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/22 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/22 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

212

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/22 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

Handwritten signature/initials

- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Pejabat yang diganti.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/44 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 955/22 TAHUN 2020
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG
 BERWENANG MENANDATANGANI SURAT
 PERINTAH MEMBAYAR DAN PENGESAHAN
 SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
 MEMBAYAR DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN YANG DIGANTI
 PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<u>Lama</u> Edhy Suryono, S.Sos., M.M. NIP. 19680829 199001 1 002	Kepala	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Ir. Purnawan Setiadi NIP. 19670318 199803 1 003	Kepala	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
2.	<u>Lama</u> Drs. Agus Winarno, M.Si NIP. 19630912 198503 1 015	Plt. Kepala	Dinas Tenaga Kerja	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Edhy Suryono, S.Sos., M.M. NIP. 19680829 199001 1 002	Kepala	Dinas Tenaga Kerja	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
3.	<u>Lama</u> Yanuar Abidin, S.H. NIP. 19640101 198903 1 032	Kepala	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Drs Bambang Widjonarko, M.Si NIP. 19690108 198803 1 001	Kepala	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
4.	<u>Lama</u> Drs. M. Fathurrohman, M.Si. NIP. 19671007 199303 1 005	Kepala	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Gatot Budiraharjo, S.Sos. NIP. 19680827 199503 1 004	Kepala	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
5.	<u>Lama</u> Pandi, S.Sos NIP. 19690717 199101 1 003	Plt.Camat	Kecamatan Karangreja	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Bangun Irianto, S.Pd. NIP. 19630507 198405 1 004	Camat	Kecamatan Karangreja	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ

1	2	3	4	5
6.	<u>Lama</u> Sisngadi, S.Sos NIP. 19620924 199203 1 004	Camat	Kecamatan Karangjambu	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Sakhiman, S.Pd. NIP. 19640828 198608 1 005	Camat	Kecamatan Karangjambu	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
7.	<u>Lama</u> Ani Lestariningsih, SAP NIP. 19630813 198403 2 009	Plt. Lurah	Kelurahan Purbalingga Wetan	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Tri Anirwo Supandri, S.Sos NIP. 19660908 199302 1 003	Lurah	Kelurahan Purbalingga Wetan	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
8.	<u>Lama</u> Tri Nuryanto, S.H. NIP. 19620927 198601 1 005	Lurah	Kelurahan Kembaran Kulon	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Eko Juli Purnomo, S.H. NIP. 19790701 200701 1 006	Lurah	Kelurahan Kembaran Kulon	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
9.	<u>Lama</u> Mujiman, SKM NIP. 19720218 199403 1 004	Kepala	UPTD Puskesmas Karangtengah	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Jartoyo, SKM NIP. 19641016 198901 003	Kepala	UPTD Puskesmas Karangtengah	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
10.	<u>Lama</u> Jartoyo, SKM NIP. 19641016 198901 003	Kepala	UPTD Puskesmas Mrebet	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Lama</u> Mujiman, SKM NIP. 19720218 199403 1 004	Kepala	UPTD Puskesmas Mrebet	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
11.	<u>Lama</u> Ediyono, SKM NIP. 19651010 199003 1 017	Kepala	UPTD Puskesmas Rembang	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> dr. Dika Satya Negara NIP. 19860816 201412 1 002	Kepala	UPTD Puskesmas Rembang	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
12.	<u>Lama</u> dr. RR. Retno Sri Haswati NIP. 19700920 200212 2 001	Kepala	UPTD Labkeskab	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
	<u>Baru</u> Soleh Marsam, SKM., M.Kes. NIP. 19720727 199603 1 005	Kepala	UPTD Labkeskab	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ

BUPATI PURBALINGGA, b

Anie
DYAH HAYUNING PRATIWI d